



Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan PT PLN (Persero) Periode 2021–2024

Muhammad Labib Fahmi¹, Iqbal Ramadhan², Muhammad Abdurrohman Al Hadi³, Darrenito Al Azzaqi⁴, Elfin Burhanuddin Achmad⁵, Avena Aurelia Riddya⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Received : 16 April 2026, Revised : 25 April 2026, Published : 11 Mei 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Iqbal Ramadhan

E-mail: iqbalmadhan13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap transparansi pelaporan keuangan PT PLN (Persero) periode 2021–2024. Transparansi pelaporan keuangan menjadi aspek penting dalam menjaga akuntabilitas perusahaan, khususnya bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola dana publik dan subsidi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap laporan keuangan interim PLN, catatan atas laporan keuangan (CALK), serta informasi pendukung yang dipublikasikan selama periode penelitian. Analisis dilakukan dengan menilai keterbukaan informasi keuangan, kelengkapan pengungkapan (*disclosure*), serta konsistensi penyajian laporan berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG, khususnya transparansi dan akuntabilitas, tercermin dalam penyajian laporan keuangan PLN yang disertai CALK yang rinci, pengungkapan subsidi listrik, perubahan struktur pengawasan seperti komite audit, serta informasi tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Dengan demikian, penerapan GCG berkontribusi positif dalam meningkatkan transparansi pelaporan keuangan PT PLN (Persero).

Kata kunci - *Good Corporate Governance*, Transparansi, Pelaporan Keuangan, CALK, PT PLN (Persero)

Abstract

This study aims to analyze the effect of *Good Corporate Governance* (GCG) implementation on the transparency of PT PLN (Persero)'s financial reporting for the 2021–2024 period. Transparency in financial reporting is a crucial aspect in maintaining corporate accountability, particularly for State-Owned Enterprises (SOEs) that manage public funds and government subsidies. The research method used is a literature study with a content analysis approach on PLN's interim financial reports, notes to the financial statements (CALK), and supporting information published during the study period. The analysis was conducted by assessing the transparency of financial information, completeness of disclosures, and consistency of report presentation based on GCG principles. The results show that the implementation of GCG principles, particularly transparency and accountability, is reflected in the presentation of PLN's financial reports, which are accompanied by detailed CALK, disclosure of electricity subsidies, changes in supervisory structures such as the audit committee, and information on management's responsibility for financial statements. Thus, the implementation of GCG contributes positively to increasing the transparency of PT PLN's financial reporting.

Keywords - *Good Corporate Governance*, Transparency, Financial Reporting, CALK, PT PLN (Persero)

How To Cite : Fahmi, M. L., Ramadhan, I., Al hadi, M. A., Al Azzaqi, D., Achmad, E. B., & Riddya, A. A. (2026). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan PT PLN (Persero) Periode 2021–2024. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(12), 1813–1820. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i12.808>

Copyright ©2026 Muhammad Labib Fahmi, Iqbal Ramadhan, Muhammad Abdurrohman Al Hadi, Darrenito Al Azzaqi, Elfin Burhanuddin Achmad, Avena Aurelia Riddya

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PLN (Persero) memegang peranan krusial dalam mendistribusikan energi listrik ke seluruh pelosok Indonesia, dengan menyelaraskan mandat pelayanan publik serta tujuan komersial perusahaan, PLN dituntut untuk mengelola keuangan perusahaan secara profesional, akuntabel, serta mampu menjaga keberlanjutan operasional dan investasi jangka panjang. Dalam konteks ini, laporan keuangan menjadi instrumen utama yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan serta menjadi dasar pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. (Cahyati et al., 2021)

Transparansi pelaporan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan, terutama bagi BUMN yang berhubungan langsung dengan dana publik dan kebijakan pemerintah. Transparansi tidak hanya terbatas pada publikasi laporan keuangan, tetapi juga mencakup kelengkapan pengungkapan informasi (disclosure) melalui catatan atas laporan keuangan (CALK), konsistensi penyajian laporan, serta keterbukaan terhadap informasi yang bersifat material. Salah satu contoh informasi material yang memerlukan transparansi tinggi adalah subsidi listrik. PLN mengungkapkan bahwa besaran subsidi listrik ditetapkan berdasarkan pagu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penetapan akhir dilakukan merujuk pada temuan audit kepatuhan terkait penyaluran subsidi listrik, yang diselenggarakan oleh auditor resmi dari Direktorat Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah elemen krusial yang dapat mendorong peningkatan transparansi dalam laporan keuangan. Prinsip-prinsip GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Penerapan prinsip tersebut dapat dilihat melalui penguatan peran pengawasan perusahaan, salah satunya dengan adanya komite audit. Pada laporan keuangan PLN, terdapat informasi mengenai perubahan struktur komite audit sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, termasuk pelantikan dan pemecatan anggota komite audit dalam periode tertentu. Ini menandakan bahwa struktur pengawasan dan tata kelola perusahaan dijalankan secara resmi dan disampaikan kepada publik sebagai bagian dari transparansi informasi.

Selain itu, transparansi juga tercermin dari adanya pernyataan tanggung jawab direksi terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan PLN mengenai tanggung jawab manajemen atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi, yang telah disahkan oleh Direksi, mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa laporan tersebut menyajikan informasi secara wajar dan selaras dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap transparansi pelaporan keuangan PT PLN (Persero) periode 2021–2024. Penelitian dilakukan dengan meninjau keterbukaan informasi pada laporan keuangan interim dan catatan atas laporan keuangan sebagai bentuk implementasi prinsip transparansi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan GCG dapat mendukung peningkatan transparansi pelaporan keuangan PLN sebagai perusahaan milik negara yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan pelayanan publik.

Bagian pendahuluan berisi uraian yang menjelaskan secara singkat masalah yang melatarbelakangi sehingga penulisan artikel dilakukan, uraian ringkas tentang hasil-hasil pengabdian terdahulu yang relevan. Bagian akhir dari Pendahuluan adalah uraian tentang tujuan pengabdian.

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori utama yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian (tinjauan teoritis), penelitian terdahulu (tinjauan empiris) yang menjelaskan hubungan antar variabel, kerangka konsep penelitian, dan rumusan hipotesis penelitian (jika ada).

Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi faktor penting yang dapat mendorong peningkatan transparansi pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. Implementasi prinsip tersebut dapat terlihat melalui penguatan fungsi pengawasan perusahaan, salah satunya melalui komite audit.

Dalam laporan keuangan PLN, terdapat pengungkapan mengenai perubahan susunan komite audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, termasuk pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit pada periode tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pengawasan dan tata kelola perusahaan secara formal dijalankan dan diinformasikan kepada publik sebagai bagian dari keterbukaan informasi.

Transparansi Pelaporan Keuangan

Selain itu, transparansi juga tercermin dari adanya pernyataan tanggung jawab direksi terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Manajemen PLN menyatakan bertanggung jawab penuh atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi, yang telah mendapatkan persetujuan Direksi untuk diterbitkan pada tanggal tertentu.

Hubungan Good Corporate Governance dengan Transparansi Pelaporan Keuangan

Transparansi tidak hanya terbatas pada publikasi laporan keuangan, tetapi juga mencakup kelengkapan pengungkapan informasi (*disclosure*) melalui catatan atas laporan keuangan (CALK), konsistensi penyajian laporan, serta keterbukaan terhadap informasi yang bersifat material. Salah satu contoh informasi material yang memerlukan transparansi tinggi adalah subsidi listrik.

PLN mengungkapkan bahwa besaran subsidi listrik ditetapkan berdasarkan pagu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penentuan akhir ditentukan berdasarkan hasil audit atas kepatuhan penggunaan bantuan subsidi listrik oleh auditor yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Anggaran dibawah naungan Kementerian Keuangan.

METODE

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif melalui pendekatan studi kasus. literatur dan studi dokumentasi, serta teknik analisis isi (content analysis). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis keterbukaan informasi dalam laporan keuangan serta mengkaji keterkaitannya dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas pada PT PLN (Persero). Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 dengan objek penelitian PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan konsolidasian interim PT PLN (Persero) per 30 Juni tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, beserta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang menyertainya. Selain itu, data juga didukung oleh *annual report*, laporan keberlanjutan, serta informasi terkait struktur tata kelola perusahaan, termasuk susunan dewan komisaris, direksi, dan komite audit. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip GCG serta tingkat transparansi pelaporan keuangan perusahaan. (10)

PEMBAHASAN

PT PLN (Persero) mengimplementasikan prinsip GCG guna menjamin tata kelola yang profesional dan transparan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PLN memiliki kewajiban moral dan operasional yang tidak hanya ditujukan bagi pemegang saham, tetapi juga demi kepentingan publik dan pemerintah. Oleh karena itu, GCG diterapkan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang

mampu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga keberlanjutan perusahaan, sekaligus menjamin bahwa seluruh operasional perusahaan telah memenuhi peraturan dan standar yang berlaku (Harahap & Ritonga, 2024).

Selain itu, penerapan GCG juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas transparansi laporan keuangan dan keandalan informasi yang disajikan kepada para pemangku kepentingan. Melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas, PLN dapat memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu, sehingga memudahkan investor, pemerintah, dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, GCG menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya yang sebagian besar berasal dari negara (Shabrina et al., 2024).

Manfaat penerapan GCG bagi PT PLN (Persero) sangat signifikan, terutama dalam meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan. Dengan adanya tata kelola yang baik, perusahaan mampu meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan, seperti fraud atau manipulasi laporan keuangan, melalui sistem pengendalian internal yang kuat. Selain itu, GCG juga membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen karena didasarkan pada informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam jangka panjang, penerapan GCG berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan serta memperkuat posisi PLN sebagai perusahaan strategis di sektor ketenagalistrikan (Elvira et al., 2025).

Adapun alasan utama penerapan GCG pada PT PLN (Persero) adalah untuk menjawab tuntutan akuntabilitas publik sebagai perusahaan milik negara yang mengelola sumber daya vital. PLN dituntut untuk menjalankan operasional secara efisien dan transparan agar tidak merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, penerapan GCG juga menjadi kebutuhan untuk menghadapi dinamika bisnis yang semakin kompleks, termasuk tuntutan global terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik. Dengan menerapkan GCG, PLN dapat meningkatkan daya saing, menjaga stabilitas keuangan, serta memastikan keberlangsungan usaha di masa depan.

Dengan demikian, penerapan Good Corporate Governance pada PT PLN (Persero) tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai strategi penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan konsolidasian PT PLN (Persero) periode 2021–2024, penerapan Good Corporate Governance (GCG) menunjukkan tren yang semakin baik, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal. Hal ini tercermin dari konsistensi penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia serta adanya peningkatan kualitas pengungkapan informasi dari tahun ke tahun.

Dalam hal transparansi, PT PLN (Persero) secara rutin menyajikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan penjelasan yang memadai. Dalam laporan tahun 2021 sampai 2023, manajemen dengan jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun secara adil sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum dan tidak mengandung informasi material yang dapat menyesatkan. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menyediakan informasi yang transparan dan dapat diandalkan kepada para pemangku kepentingan. Pada tahun 2024, tingkat transparansi semakin meningkat dengan adanya pengungkapan yang lebih rinci, termasuk informasi terkait aset derivatif, piutang pemerintah, serta investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama (Shabrina et al., 2024).

Dari aspek akuntabilitas, penerapan GCG dapat kita lihat melalui adanya pernyataan tanggung jawab direksi dalam setiap laporan keuangan. Direksi tidak hanya bertanggung jawab atas penyusunan laporan, tetapi juga memastikan bahwa laporan tersebut didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, penyajian laporan keuangan yang konsisten antar periode juga memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap kredibilitas informasi yang disampaikan (Harahap & Ritonga, 2024).

Selanjutnya, dari sisi pengendalian internal, PT PLN (Persero) menunjukkan adanya sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Perusahaan secara jelas menyatakan tanggung jawab atas efektivitas pengendalian internal, baik pada tingkat entitas induk maupun anak perusahaan. Stabilitas nilai aset dari tahun 2021 hingga 2023, serta peningkatan signifikan pada tahun 2024 dari Rp1.589.654.638 juta menjadi Rp1.691.206.219 juta, angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara terkendali dan tersusun. Hal ini menunjukkan bahwa proder pengendalian internal berjalan dengan sebagaimana mestinya dalam menjaga keandalan laporan keuangan.

Selain itu, penerapan prinsip tanggung jawab juga terlihat dari kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK dan disajikan secara periodik, yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjaga transparansi kepada publik. (Wahjono, 2025) Sementara itu, prinsip independensi tercermin dari penyusunan laporan keuangan yang objektif dan bebas dari intervensi yang dapat mempengaruhi keandalan informasi, meskipun secara eksplisit aspek ini lebih terlihat melalui proses audit eksternal (Syafii, 2025).

Secara keseluruhan, penerapan GCG pada PT PLN (Persero) selama periode 2021–2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2021, penerapan GCG sudah berada pada kategori baik dengan tingkat transparansi yang tinggi, namun masih dalam batas pengungkapan standar. Pada tahun 2022 dan 2023, kualitas penerapan GCG meningkat dengan adanya penyajian informasi yang lebih rinci dan komprehensif. Puncaknya pada tahun 2024, perusahaan menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dengan pengungkapan informasi yang lebih kompleks dan mendalam.

Tabel 1.

Tabel Perbandingan Pendapatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024

Komponen	2021	2022	2023	2024	Naik/Turun
Penjualan Tenaga Listrik	140.489.125	150.550.915	159.971.563	171.801.960	+10.061.790
Penyambungan Pelanggan	202.187	382.460	584.331	812.831	+180.273
Subsidi Listrik Pemerintah	24.552.646	26.189.358	32.069.605	37.266.626	+1.636.712
Pendapatan Kompensasi	8.883.059	31.226.632	37.857.021	46.493.492	+22.343.573
Pendapatan Lain-lain	1.791.540	3.310.867	4.037.185	5.688.317	+1.519.327
Total Pendapatan Usaha	175.918.557	211.660.232	234.519.705	262.063.226	

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa seluruh komponen mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Kenaikan berasal dari faktor penjualan dan pendapatan kompensasi, dimana kedua komponen tersebut mencerminkan adanya peningkatan aktivitas operasional serta dukungan pemerintah. Penjualan listrik meningkat sebesar Rp 10.061.790, dengan itu menunjukkan adanya kenaikan konsumsi listrik oleh pelanggan atau adanya penyesuaian tarif yang berdampak pada peningkatan pendapatan utama perusahaan.

Pendapatan dari penyambungan pelanggan juga mengalami kenaikan sebesar Rp 180.273 juta. Hal ini mengindikasikan terjadinya pertumbuhan jumlah pelanggan baru. Selain itu subsidi listrik juga meningkat Rp1.636.712, hal tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mendukung operasional perusahaan, khususnya dalam menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

Kenaikan signifikan terjadi pada pendapatan kompensasi yang meningkat sebesar Rp 22.343.573, dengan adanya peningkatan tersebut menunjukkan adanya tambahan kompensasi dari pemerintah atas penugasan tertentu yang diberikan kepada perusahaan, seperti pengadaan tarif listrik tertentu. Selain itu, pendapatan lain-lain juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.519.327 yang berasal dari berbagai sumber diluar kegiatan utama perusahaan.

Dari sisi kinerja keuangan, transparansi tercermin melalui konsistensi dalam penyajian data keuangan antar periode. Total aset PT PLN (Persero) mengalami peningkatan di tahun 2021 total aset

tercatat sebesar Rp 1,589,654,638 triliun, kemudian di tahun 2022 total aset meningkat menjadi Rp 1,639,844,171 triliun, ditahun 2023 Pertumbuhan terus berlanjut dengan total aset mencapai Rp 1,646,441,796 triliun dan di tahun 2024 total aset perusahaan mencapai di angka Rp 1,691,206,219 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan secara terbuka melaporkan perkembangan asetnya tanpa adanya indikasi penyembunyian informasi. Selain itu, pendapatan usaha juga mengalami kenaikan sehingga hal tersebut yang mencerminkan adanya pengungkapan yang jelas terhadap sumber-sumber pendapatan, termasuk penjualan tenaga listrik, subsidi pemerintah, dan kompensasi.

Lebih lanjut, PLN juga mengungkapkan bahwa besaran subsidi listrik hasil akhir Penentuan tersebut mengacu pada temuan audit kepatuhan atas pemanfaatan subsidi listrik, yang dilakukan oleh auditor mandat dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Dengan adanya pengungkapan ini mencerminkan bahwa PLN tidak hanya mempublikasikan nilai subsidi, tetapi juga menyampaikan proses pengawasan eksternal yang dilakukan pemerintah, sehingga memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan subsidi.

Pada laporan keuangan Juni 2022, PLN kembali mengungkapkan pagu subsidi listrik tahun anggaran 2022 sebesar Rp56.479.904 serta menjelaskan rincian pendapatan subsidi listrik, penerimaan tunai, hingga piutang subsidi listrik pada periode berjalan . Konsistensi pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa PLN melakukan pelaporan secara sistematis dan terbuka dari tahun ke tahun.

Pada laporan keuangan Juni 2024, pagu tertinggi subsidi listrik kembali meningkat, yaitu sebesar Rp75.831.220 untuk tahun anggaran 2024 dan Rp72.576.859 untuk tahun anggaran 2023 . PLN juga merinci jumlah subsidi listrik periode berjalan, penerimaan tunai, serta piutang subsidi listrik secara jelas . Hal ini memperlihatkan adanya peningkatan keterbukaan informasi yang semakin rinci terkait subsidi listrik sebagai pos pendapatan penting dalam laporan keuangan.

Tabel 2.

Tabel Perbandingan Subsidi listrik dari tahun 2021 hingga tahun 2024

Tahun LK (Per 30 Juni)	Pagu Subsidi Listrik (Tahun Anggaran)	Subsidi Listrik Semester I	Penerimaan Tunai Subsidi	Piutang Subsidi Listrik (akhir periode)
2021	Rp53.587.310	Rp24.552.646	(Rp18.328.768)	Rp4.556.911
2022	Rp56.479.904	Rp26.189.358	(Rp21.270.989)	Rp6.893.001
2024	Rp75.831.220	Rp37.266.626	(Rp29.687.289)	Rp12.191.137

Tabel 3.

Tabel perbandingan total aset pada PT PLN dari tahun 2021 hingga tahun 2024 :

	2021	2022	2023	2024
Total Aset	1,589,654,638	1,639,844,171	1,646,441,796	1,691,206,219

Dengan adanya penerapan GCG (Good Corporate Governance pada PT PLN pada periode 2021 hingga 2024 memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya konsistensi mereka dalam penyajian laporan keuangan antar periode, dimana perusahaan secara sistematis menyajikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi , serta catatan atas laporan keuangan dengan struktur yang sama. Konsistensi ini bertujuan untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam melakukan perbandingan dan analisis kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Selain itu, transparansi juga terlihat dari keterbukaan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, didalam laporan keuangan PLN tidak hanya menyajikan angka-angka utama, namun juga melengkapi dengan penjelasan rinci melalui catatan atas laporan keuangan (CALK). Sehingga dengan adanya CALK dapat dipahami secara jelas, (Maryanto, 2019). menunjukkan bahwa perusahaan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

berupaya memenuhi prinsip transparansi dengan menyediakan informasi yang lebih relevan, tepat, dan mudah dijangkau oleh pengguna laporan.

Penerapan GCG juga mendorong akan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan berlandaskan pada SAK maka laporan keuangan yang disusun menjadi lebih andal dan dapat dipercaya. Tidak hanya itu, dengan adanya pernyataan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan serta sistem pengendalian internal sehingga menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab secara baik. Hal ini memiliki peran penting dalam meminimalkan risiko kesalahan penyajian maupun potensi kecurangan dalam laporan keuangan.

Penerapan GCG pada PT PLN berkontribusi dalam meningkatkan kualitas transparansi pelaporan keuangan selama periode 2021 hingga 2024. Tingginya tingkat transparansi tidak hanya untuk memperkuat stakeholder, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan tata kelola yang sehat dan berintegritas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT PLN (Persero) telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara efektif, dan penerapan tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan. Semakin baik implementasi GCG, maka semakin tinggi kualitas keterbukaan informasi yang dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan.

KESIMPULAN

Analisis terhadap laporan keuangan konsolidasian PT PLN (Persero) rentang tahun 2021–2024 membuktikan bahwa implementasi Good Corporate Governance (GCG) berkontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi finansial. Keterbukaan ini tercermin dari penyajian laporan yang sistematis dan detailnya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang pada akhirnya mempermudah stakeholder dalam melakukan evaluasi kinerja perusahaan secara akurat.

Transparansi juga tercermin melalui keterbukaan PLN dalam mengungkapkan komponen pendapatan usaha secara jelas, termasuk penjualan tenaga listrik, subsidi listrik pemerintah, pendapatan kompensasi, serta pendapatan lain-lain yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Selain itu, PLN juga secara terbuka melaporkan perkembangan aset perusahaan yang terus meningkat selama periode penelitian, sehingga mencerminkan tidak adanya indikasi penyembunyian informasi material dalam pelaporan keuangan.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam GCG ditunjukkan melalui adanya pernyataan tanggung jawab manajemen dan direksi terhadap penyusunan laporan keuangan serta sistem pengendalian internal yang mendukung keandalan laporan. PLN juga secara transparan mengungkapkan mekanisme penetapan subsidi listrik yang ditetapkan berdasarkan pagu anggaran serta audit ketaatan subsidi oleh auditor yang ditunjuk Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dengan demikian, penerapan GCG pada PT PLN (Persero) berkontribusi dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap laporan keuangan perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan adanya korelasi positif antara kualitas penerapan Good Corporate Governance dengan tingkat transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan, sehingga PLN dapat mempertahankan kredibilitasnya sebagai BUMN strategis dalam sektor ketenagalistrikan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian artikel ini. Ucapan terimakasih secara khusus ditunjukkan kepada dosen pembimbing atas arahan, saran, serta bimbingan yang tak terhingga selama proses

kepenulisan. Apresiasi juga disampaikan kepada PT PLN (Persero) UID Jateng dan PT PLN (Persero) UP 3 Semarang atas penyediaan laporan keuangan sebagai data utama penelitian ini. Tidak lupa juga, terima kasih kepada rekan-rekan dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun teknis. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen .

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyati, W. N., Hariyanto, E., Setyadi, E. J., & Inayati, N. I. (2021). Pengaruh rotasi audit, audit tenure, fee audit, dan komite audit terhadap kualitas audit (Studi pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2019). *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*.
- Elvira, I., Nirmala, A. P., Safitri, N. R., & Kusumaningtiyas, R. (2025). Analisis Peran Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Pt Telekomunikasi Indonesia TBK. *8(5)*, 70–75.
- Harahap, T., & Ritonga, R. A. (2024). Peran Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan. *2(2)*, 353–360.
- Irwin. (2025). Peran Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Publik. *8(2)*, 5230–5235.
- Maryanto, M. (2019). Analisis penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Sakti (JES)*.
- Nasution, A. P. A., & Kartini, K. (2026). Evaluasi kinerja keuangan BUMN sektor ketenagalistrikan: Studi kasus PT PLN (Persero) UP3 Pekanbaru. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*.
- Nur, R. K. M., Halim, M., & Fitriya, E. (2020). Integritas laporan keuangan berdasarkan good corporate governance. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*.
- PLN, P. (2021). *Laporan Keuangan Perusahaan Persero PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2021*.
- PLN, P. (2022). *Laporan Keuangan Perusahaan Persero PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2022*.
- PLN, P. (2023). *Laporan Keuangan Perusahaan Persero PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2023*.
- PLN, P. (2024). *Laporan Keuangan Perusahaan Persero PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2024*.
- Shabrina, H. N., Putri, R. A., Fitriyani, S., Ananda, R. A., & Dewi, A. P. (2024). Pentingnya Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan PT. *KAI Heldi*. *8(1)*, 101–115.
- Syafii, M. (2025). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka di Indonesia. *4(2)*, 8261–8268.
- Wahjono, W. (2025). Pandangan terhadap peranan sistem informasi dalam pencatatan transaksi keuangan serta dampaknya terhadap efektivitas manajemen perusahaan. *Jurnal Ilmiah Infokam*.